

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA NTB TAHUN 2018-2022

M. Hafizal Insani¹, Abdul Manan², Eka Agustiani³

^{1, 2, 3}Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Email: hafizalm509@gmail.com

Article History

Received: 09-06-2024

Revision: 14-06-2024

Accepted: 15-06-2024

Published: 16-06-2024

Abstract. This research aims to determine the influence of local original income (regional taxes and regional levies), and balancing funds (profit sharing funds, general allocation funds, and special allocation funds), on the Regency/City Human Development Index in NTB Province for 2018-2022. Data analysis uses panel data regression with the fixed effect model method. The results of this research show that regional taxes do not have a significant effect on the Regency/City Human Development Index in NTB Province. Regional levies do not have a significant effect on the Regency/City Human Development Index in NTB Province. Profit Sharing Funds do not have a significant effect on the District/City Human Development Index in NTB Province. General Allocation Funds do not have a significant effect on the Regency/City Human Development Index in NTB Province. Special Allocation Funds have a positive and significant effect on the District/City Human Development Index in NTB Province.

Keywords: Revenue, Region, Balance Fund, Development Index

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), dan Dana Perimbangan (Dana Bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2018-2022. Analisa data menggunakan regresi data panel dengan metode *fixed effect model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. (3) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Kata Kunci: Pendapatan, Daerah, Dana Perimbangan, Indeks Pembangunan

How to Cite: Insani, M. H., Manan, A & Agustiani, E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota NTB Tahun 2018-2022. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (2), 355-366. <http://doi.org/10.54373/ifjeb.v4i2.1281>

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Pada hakikatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan dengan tidak mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada untuk

bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual. *Human resources* atau sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mendorong pembangunan. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dalam proses pembangunan. Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan (Wijaya, 2018). Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia (Human Development Report 1990).

Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh *United Development Programe* (UNDP) adalah *Human development indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDI dibentuk oleh tiga dimensi yang dianggap mendasar dalam pembangunan manusia yaitu pendidikan yang diwakili oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup saat lahir dan standar hidup layak yang diukur dari Produk Domestik Bruto perkapita (BPS 2023). Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada urutan ke 29 (keenam terendah) dari 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat capaian IPM sebesar 69,46 capaian ini masuk dalam kategori daerah dengan IPM menengah. Selain itu, pencapaian IPM Provinsi NTB lebih rendah dari standar Indeks Pembangunan Manusia nasional yang mencapai 72,91. Rendahnya capaian IPM provinsi NTB diakibatkan oleh dua indikator yang pertama dari segi pendidikan yang dibentuk oleh dua dimensi pengetahuan yakni Harapan Lama Sekolah atau HLS dan Rata-Rata Lama Sekolah atau RLS. Sedangkan, indikator kedua dipengaruhi oleh kesehatan, yang dilihat dari Umur Harapan Hidup saat lahir atau UHH (Wahyudin, 2023).

Berdasarkan data dari BPS NTB (2023) selama periode 2010 hingga 2022 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Bahkan pertumbuhannya menjadi tertinggi kedua di Indonesia setelah Papua. IPM Provinsi NTB mencapai 69,46 pada tahun 2022, meningkat hingga 1,18 persen dibandingkan tahun 2021. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010-2022 menjadi sebesar 1,07 persen per tahun. Peningkatan capaian IPM Provinsi NTB Tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan seluruh komponen pembentuk IPM, terutama rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Seluruh komponen pembentuk IPM Provinsi NTB mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali komponen harapan lama sekolah pada dimensi pengetahuan yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

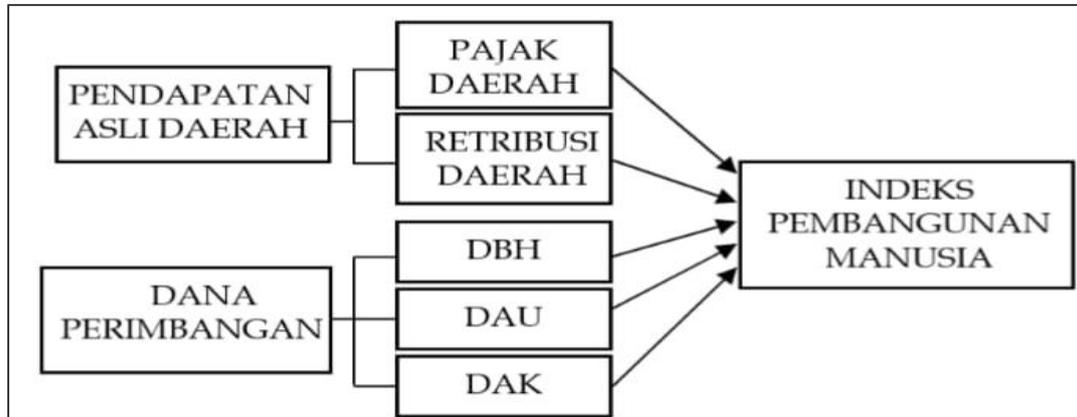
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anim Rahmayanti, 2018).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Dua komponen pendapatan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan menjadi komponen utama yang paling banyak memberi sumbangan dalam APBD. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Mamuka & Elim, 2014). Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal (Santoso & Suparta, 2015). Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pengeluaran pemerintah merupakan perputaran dari pendapatan yang diperoleh dari berbagai macam pendapatan (Ridwan & Nawir, 2021). Secara umum pengeluaran pemerintah diharapkan memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian, hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan di suatu negara. Menurut Mangkoesoebroto (2016) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah, setiap tahun pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU-APBN) sebagai hak dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara pemerintah daerah setiap tahun menetapkan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebijakan pembangunan masing-masing daerah. APBN dan APBD menjadi alat utama pemerintah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2022”

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka konseptual

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif kausal. Penelitian ini menguji hipotesis yang ditetapkan dan untuk mencari pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah penelitian, diantaranya Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima, Kab. Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima. Adapun rentang waktu yang digunakan pada penelitian adalah dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Dalam penelitian pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka, dimana data yang diperoleh dalam bentuk dokumen yang sudah ada melalui instansi terkait. Data Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi NTB diperoleh melalui website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi NTB diperoleh melalui website resmi portal data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka atau bilangan yang dapat diukur besarnya dan dapat dihitung secara pasti. Data kuantitatif dalam penelitian ini terdiri dari data Pajak, Retribusi, Dana Bagi Hasil, Dana Aokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara

Barat Tahun 2018-2023. Data dalam penelitian bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau instansi dan sumber lain penyedia data.

Variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah yang diproksikan dengan pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2). Sedangkan Dana Perimbangan diproksikan dengan dana bagi hasil (X3), dana alokasi umum (X4), dana alokasi khusus (X5), serta variabel dependent yaitu Indeks Pembangunan Manusia (Y). Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir 2018-2022, maka metode analisis yang digunakan ialah metode analisis regresi linier berganda atau metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square) yang diolah menggunakan *software Eviews10* dengan permodelan regresi data panel.

HASIL

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia secara parsial dan simultan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data APBD, APBN dan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018-2022.

Model Regresi Data Panel

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 1. Hasil uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	32.217819	(9,35)	0.0000
Cross-section Chi-square	111.417758	9	0.0000

Sumber: Olahan Data Eviews 10, 2024

Hasil pada tabel 1 menunjukkan *probability* dari *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Maka sesuai kriteria keputusan maka pada model ini menggunakan model *fixed effect*. Karena hasil pada uji chow menggunakan model *fixed effect*, maka perlu melakukan pengujian lanjutan dengan uji Hausman untuk memastikan antara model *fixed effect* atau *random effect* yang akan digunakan pada penelitian.

Tabel 2. Hasil uji hausman

Test summary	Chi-sq. statistic	Chi-sq. d.f.	prob
Cross-section random	14.197757	5	0,0144

Sumber: Olahan Data Eviews 10, 2024

Pada tabel 2 menunjukkan nilai probability *cross-section random* sebesar 0,0144 dimana nilai tersebut lebih rendah dari 0,05 artinya pada hasil uji Hausman memilih menggunakan model *fixed effect*. Berdasarkan hasil pemilihan model data panel, maka untuk menilai uji regresi data panel menggunakan model *fixed effect* dalam menentukan keputusan hasil penelitian ini.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 3. Hasil regresi data panel model fixed effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.11512	5.487440	11.86621	0.0000
X1	0.004955	0.013935	0.355559	0.7243
X2	0.009918	0.050954	0.194647	0.8468
X3	0.000856	0.002878	0.297510	0.7678
X4	0.001510	0.007158	0.210961	0.8341
X5	0.017794	0.008097	2.197556	0.0347

Cross-section fixed (dummy variables)

Berdasarkan tabel 4 telah diperoleh dari koefisien regresi di atas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$y_{it} = 65.11512 + 0.004955X_{1it} + 0.009918X_{2it} + 0.000856X_{3it} + 0.001510X_{4it} + 0.017794X_{5it} + \varepsilon_{it}$$

Hasil Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Berdasarkan pada tabel 3 dapat dilihat hasil uji t maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *p-value* dari *t-statistic* sebesar 0,7243, dimana nilai tersebut lebih besar dar inilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05 (0,7243>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada tahun 2018-2022.
- *p-value* dari *t-statistic* sebesar 0,8468, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05 (0,8468>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah (X2) tidak berpengaruh signifikan

terhadap terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada tahun 2018-2022.

- *p-value* dari *t-statistic* sebesar 0,7678, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05 ($0,7678 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana bagi hasil (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada tahun 2018-2022.
- *p-value* dari *t-statistic* sebesar 0,8341, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05 ($0,8341 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada tahun 2018-2022.
- *p-value* dari *t-statistic* sebesar 0,0347, dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian sebesar 0,05 ($0,0347 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi khusus (X5) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Provinsi NTB pada tahun 2018-2022.

Tabel 4. Hasil uji F dan R²

R-squared	0.939040	Mean dependent var	69.31960
Adjusted R-squared	0.914656	S.D. dependent var	4.289387
S.E. of regression	1.253088	Akaike info criterion	3.532424
Sum squared resid	54.95803	Schwarz criterion	4.106031
Log likelihood	-73.31060	Hannan-Quinn criter.	3.750857
F-statistic	38.51052	Durbin-Watson stat	2.760485
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Olahan Data Eviews 10, 2024

Uji Simultan (Uji-F)

Berdasarkan tabel 4 menjelaskan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar $0,000000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R^2 , menunjukkan 0,914656, yang artinya model ini cukup kuat untuk menjelaskan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 91 persen sedangkan sisanya sebesar 9 persen variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DISKUSI

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap IPM

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian adalah untuk menguji bagaimana pengaruh Pajak Daerah (X_1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Pada tabel 3 nilai probability Pajak Daerah (X_1) sebesar 0,7243 berada lebih besar dari α 0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar 0,355559. Artinya Pajak Daerah (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y), maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia ditolak. Hasil ini menjelaskan bahwa dengan nilai pajak yang diterima oleh suatu daerah baik itu banyak atau sedikit tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2017-2021)” oleh Anika Sari, dkk.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap IPM

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian adalah untuk menguji bagaimana pengaruh Retribusi Daerah (X_2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Pada tabel 3 nilai probability Retribusi Daerah (X_2) sebesar 0,8468 berada lebih besar dari α 0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar 0,194647. Artinya Retribusi Daerah (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y), maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia ditolak. Hasil ini menjelaskan bahwa retribusi daerah belum memberikan pengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap IPM

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian adalah untuk menguji bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (X3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Pada tabel 3 nilai probability Dana Bagi Hasil (X3) sebesar 0,7678 berada lebih besar dari α 0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar 0,297510. Artinya Dana Bagi Hasil (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y), maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia ditolak. Hasil ini menjelaskan bahwa penggunaan dana bagi hasil untuk mendanai kebutuhan daerah tidak mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Penggunaan Dana Bagi Hasil merupakan wewenang dari pemerintah daerah (Rahmayanti, 2018). Namun dalam penggunaannya terdapat beberapa komponen yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam hal penggunaan Dana Bagi Hasil untuk kesejahteraan masyarakat yang akan menyebabkan pengalokasian Dana Bagi Hasil kurang berdampak secara signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016)” oleh Lalu Ariya Wira Wijaya.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap IPM

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (X4) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Pada tabel 3 nilai probability Dana Alokasi Umum (X3) sebesar 0,8341 berada lebih besar dari α 0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar 0,210961. Artinya Dana Alokasi Umum (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y), maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia ditolak. Hasil ini menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatra Barat” oleh Zul Fadhly.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap IPM

Hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (X5) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y). Pada tabel 3 nilai probability Dana Alokasi Khusus (X5) sebesar 0,0347 berada lebih kecil dari α 0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar 2,197556. Artinya Dana Alokasi Khusus (X5) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y), maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis kelima (H_5) yang menyatakan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia diterima. Hasil tersebut menjelaskan bahwa dengan semakin meningkatnya alokasi DAK sangat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang semakin baik. Peningkatan alokasi DAK yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang sesuai dengan tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan manusia. DAK berpengaruh terhadap IPM melalui alokasi pembiayaan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menjadi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sesuai dengan teori pengeluaran pemerintah dimana pada tahap awal dan menengah pemerintah memiliki peran dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana yang layak bagi masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan alokasi DAK harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dipastikan tepat sasaran oleh pemerintah daerah (Wijaya, 2018). Alokasi DAK juga merupakan bantuan yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dasar pemerintah sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan dan merupakan bantuan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian sebelumnya dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatra Barat” oleh Zul Fadhly.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Variabel Pajak Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Variabel Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sementara itu, variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil,

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Sedangkan secara parsial hanya Dana Alokasi Khusus yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan bagi Pemerintah untuk lebih meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yakni dengan memanfaatkan penghasilan daerah dan dana transfer secara lebih efisien sehingga dapat meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang akan berdampak terhadap peningkatan pembangunan daerah. Sementara itu, rekomendasi bagi peneliti selanjutnya ialah keterbatasan dalam penelitian ini hendaknya disempurnakan misalnya dengan memperluas variabel yang digunakan yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk selalu menggunakan tahun terbaru dalam melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Retrieved September 7, 2023, from ntb.bps.go.id
- Darwanto, D., Khasanah, M., & Putri, A. M. (2021). *Strengthening Literacy, Numeracy, and Technology Adaptation in School Learning (An Effort to Face the Digital Era and Disruption)*. *Eksplorential Journal*, 11(2), 26–35.
- Dianti Lalira, A. T. 2018. *Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.18 No.04 62-72.
- Fadhly, Z. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–15.
- Fatimah, S., Handayani, T., Ekonomi, F., Mataram, U., & Kunci, K. (2022). *Analisis Dana Perimbangan Kaitannya Dengan Percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 2020*
- Kementerian Keuangan RI. (n.d) *.Portal Data SIKD*. Retrieved September 7, 2023, from djk.kemenkeu.go.id.
- Kustiyahningsih dan Anamisa (2011:8). (2014). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Pembangunan Daerah*, Edisiketiga. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesebroto, D. (2016). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. (2014). *Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal EMBA*. Vol 2, No.1: 646-655
- Rahmayati, A., & Imanda, P. F. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. *Journal of Islamic Finance*

- Vol. 1 No. 1*, 4661.
- Ramadhani, S., & Utomo, C. (Eds.). (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Dan Dana Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Solusi*, 17(1), 40–58.
- Santoso, Imam & I Wayan Suparta (2015). Flypaper Effect pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.4 No.2* : 135-165.
- Sari, R. A., & Rochmatullah, M. R. (2023). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2017-2021). *Management Studiess and Entrepreneurship Journal Vol 4(5)* , 5984-5994.
- Saragih, Arfah Habib. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Economia, Volume 14, Nomor 2*.
- Todaro, Michhaael P. dan Stephen C Smith. 2011 *Pembangunan Ekonomi*, edisi kesebelas. Jakarta: Erlangga.
- Wijaya, L. A. W. (2018). Analisis Pengaruh Penapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016). *Jurnal Ilmiah*, 1–18.
- Widarjono, A. 2005. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UII
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*